

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini akan disimpulkan tentang permasalahan dalam pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengentaskan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Program PKH tersebut masih berjalan sampai saat ini dan akan berhenti apabila program ini telah sukses. Berikut hasil penelitiannya:

1. Untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan PKH tahun 2018 di Desa Serut dapat dilihat dari proses implementasi kebijakan yang dilaksanakan. Dalam implementasi sebuah program khususnya melibatkan banyak organisasi/ instansi pemerintah, sehingga proses implementasi kebijakan dapat dilihat berbagai sudut pandang. Diantaranya sebagai berikut:
 - a. Pemrakarsa Kebijakan/ Pembuat Kebijakan (*the center/* pusat)

Menurut sudut pandang ini, pihak pemerintah pusat telah memenuhi tugasnya dengan baik seperti pemenuhan kuota peserta PKH, sistem pencairan PKH yang memudahkan peserta PKH serta pencairan bantuan yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun masih terdapat kesalahan sasaran dalam menetapkan peserta PKH.
 - b. Pejabat-Pejabat Pelaksana Lapangan (*the periphery*)

Menurut sudut pandang ini, pihak-pihak pelaksana di lapangan sudah melakukan tugasnya dengan baik seperti para pendamping PKH yang sudah mendampingi para peserta PKH dengan baik. Namun untuk pihak desa, belum secara maksimal melaksanakan tugasnya seperti masih kurang maksimalnya fasilitas untuk kegiatan posyandu.

c. Kelompok Sasaran (*target group*)

Sudut pandang ini berkaitan dengan sejauh mana bantuan yang diberikan pihak pusat (pemerintah), apakah benar-benar sudah memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi peningkatan mutu hidup bagi kelompok sasaran. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan selama penelitian, manfaat PKH sangat besar dirasakan oleh semua peserta PKH. Yakni dapat meringankan biaya pendidikan dan kesehatan.

Dalam hal mengentaskan kemiskinan, Islam memandang bahwa kemiskinan tidak dapat dihilangkan namun masih ada upaya untuk meminimalisir kemiskinan agar kehidupan sejahtera dapat diraih seperti dengan adanya PKH ini. Jika dilihat dari usaha pengentasan kemiskinan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban setiap individu

Ini berkaitan dengan adanya program bantuan PKH, dimana meskipun keluarga yang kurang mampu mendapat bantuan PKH namun tetap mereka harus bekerja. Karena bantuan PKH ini hanya

bersifat membantu untuk meringankan kebutuhan pendidikan dan kesehatan dan bukan untuk memenuhi secara keseluruhan kebutuhan kehidupan keluarga yang kurang mampu.

b. Kewajiban kelompok masyarakat

Islam telah meletakkan modal pertama bagi terciptanya jaminan sosial. Ini seperti dalam pelaksanaan PKH dimana masyarakat kurang mampu sangat terbantu dengan bantuan yang diberikan.

c. Kewajiban pemerintah

Pemerintah berkewajiban dalam mengentaskan kemiskinan pada daerah yang ia pimpin. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa memang apa yang namanya kemiskinan tidak dapat dhapuskan begitu saja. Dirancangnya bantuan PKH adalah sebatas untuk memutus rantai kemiskinan yang ada di masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi PKH di Desa Serut sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal dan perannya dalam hal kemiskinan adalah sebatas memutus rantai kemiskinan yang ada.

2. Kendala-kendala dalam proses implementasi PKH di Desa Serut diantaranya seperti kendala yang dihadapi oleh pihak pendamping PKH yakni saat kegiatan sekolah FDS. Karena KPM terdiri dari para orangtua yang umurnya sudah lebih dari 40 tahun sehingga tergolong SDM nya rendah jadi ketika diajari FDS agak lama. Selain itu juga terkadang KPM masih menyalahkan pendamping PKH jika masih ada kesalahan sasaran

penerima PKH padahal pendamping PKH hanya melaksanakan data yang di dapat dari desa.

Di lain sisi, pihak KPM sendiri juga mengalami beberapa kendala seperti yang terjadi saat pencairan sembako berupa beras dan telur, ada KPM yang belum mendapat sembako sehingga menimbulkan sikap iri terhadap KPM yang sudah mendapat sembako. Selain itu, keluhan lain adalah saat ketua kelompok PKH meminta KPM untuk mengumpulkan iuran untuk biaya administrasi ATM tetapi ketua kelompok PKH malah dikira melakukan pungutan liar, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Selain itu juga masih ada para anggota PKH yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik yakni tidak menggunakan bantuan yang diberikan dengan semestinya. Ini berarti bahwa para anggota PKH belum sadar betul akan kewajibannya dalam menggunakan bantuan yang diterima.

3. Implementasi PKH dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung ditinjau dari prinsip-prinsip ekonomi Islam sebenarnya sudah maksimal dalam menerapkan prinsip ‘adl; nubuwwah sifat amanah, fatonah, tabligh; prinsip khilafah dan prinsip ma’ad. Namun belum secara maksimal menerapkan prinsip tauhid dan nubuwwah sifat siddiq.

B. Saran

1. Bagi pihak pemerintah pusat dalam hal Implementasi PKH dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan program tersebut. Seperti telah memenuhi tugasnya dengan baik dalam hal pemenuhan kuota peserta PKH, sistem pencairan PKH yang memudahkan peserta PKH serta pencairan bantuan yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun masih terdapat kesalahan sasaran dalam menetapkan peserta PKH yang seharusnya pihak pemerintah pusat melakukan verifikasi secara menyeluruh mengenai data calon peserta PKH.
2. Bagi pihak desa dalam hal Implementasi PKH dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung belum secara maksimal melaksanakan tugasnya seperti masih kurang maksimalnya fasilitas untuk kegiatan posyandu. Sehingga seharusnya pihak desa membantu menyediakan fasilitas kesehatan dengan maksimal sehingga tujuan dari PKH dapat tercapai dengan baik.
3. Bagi pihak pendamping PKH dalam hal Implementasi PKH dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung sebenarnya sudah melaksanakan tugas dengan baik namun kendalanya saat kegiatan sekolah FDS. Karena KPM terdiri dari para orangtua yang umurnya sudah lebih dari 40 tahun sehingga

tergolong SDM nya rendah jadi ketika diajari FDS agak lama. Jadi perlu kesabaran dalam hal sekolah FDS dan sebaiknya materi FDS disampaikan dengan bahasa yang singkat dan mudah dipahami.

4. Bagi anggota PKH sendiri dalam hal Implementasi PKH dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung juga mengalami beberapa kendala seperti yang terjadi saat pencairan sembako berupa beras dan telur, ada KPM yang belum mendapat sembako sehingga menimbulkan sikap iri terhadap KPM yang sudah mendapat sembako. Seharusnya pihak pemerintah pusat segera mengatasi masalah ini dengan melakukan pendataan secara menyeluruh dan dengan cepat meratakan bantuan berupa sembako.

Selain itu juga masih ada para anggota PKH yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik yakni tidak menggunakan bantuan yang diberikan dengan semestinya. Ini berarti bahwa para anggota PKH belum sadar betul akan kewajibannya dalam menggunakan bantuan yang diterima. Seharusnya, para anggota PKH memiliki kesadaran sendiri bahwa kewajibannya sebagai KPM adalah menggunakan dana itu dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan dari program dapat tercapai.